

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana APBN dan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana. Menurut Indra Bastian (2010:6) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut : “Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada

pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen–departemen di bawahnya”.

Akuntansi pemerintahan harus diterapkan agar pengelolaan dana publik dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula kepada publik. Penerapan akuntansi ini harus dilakukan di seluruh struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), sedangkan pemerintah daerah bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam lingkup pemerintah daerah, dana yang tertuang dari APBD itu disalurkan kembali kepada struktur pemerintahan di daerahnya untuk dikelola.

Maka dari itu salah satu struktur pemerintahan daerah yang menerapkan akuntansi dalam rangka mengelola dana publik adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Dana publik yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung ini dikelola dan digunakan untuk kebutuhan dalam rangka menjalankan tugas pokok di bidang keuangan daerah. Berdasarkan aturan akuntansi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan membuat perencanaan anggaran.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Perencanaan anggaran adalah kegiatan yang menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Klasifikasi anggaran yang terdapat dalam rencana anggaran Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Bandung ini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah.

Secara umum anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode yang akan datang hal ini tertuang dalam laporan keuangan, terutama pemerintah daerah. Kita dapat melihat laporan keuangan untuk menilai pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan bukan hanya orang-orang di bidang akuntansi yang memahami laporan keuangan akan tetapi justru penggunaannya adalah publik atau semua kalangan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran karena berisikan pertanggungjawaban kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

Adapun unsur laporan keuangan khususnya dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA

Semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung dan tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

3. Transfer

Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

#### 4. Pembiayaan

Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali.

Di dalam unsur laporan realisasi anggaran yang telah dipaparkan di atas peneliti hanya mengambil unsur belanja saja. Berdasarkan klasifikasi anggaran secara keseluruhan yang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satunya belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai. merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Belanja Bunga, merupakan belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
  - c. Belanja Subsidi, yaitu untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

- d. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.
- e. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, merupakan penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Belanja Bantuan Keuangan, ialah untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- h. Belanja Tidak Terduga, merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai, merupakan belanja langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya.

Proses pembuatan rencana anggaran perlu memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan agar rencana anggaran yang di buat itu baik dan ketika proses pelaksanaan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan serta dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang

diperoleh dari pemerintah tersebut. M. Nafarin (2007:12) menyebutkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi pembuatan rencana anggaran diantaranya :

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum organisasi/perusahaan, seperti memahami visi, misi dan tujuan dari organisasi tersebut.
2. Data-data waktu yang lalu, seperti data-data organisasi di tahun-tahun sebelumnya. Data ini nantinya dijadikan sebagai bahan informasi.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi.
4. Pengetahuan tentang strategi.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah.
6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan / organisasi.

Melalui laporan realisasi anggaran, akan dilihat apakah hal-hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu diperhatikan juga dalam proses pembuatan perencanaan anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung. Dalam hal-hal tersebut diharapkan untuk membuat perencanaan yang dibuat dapat berjalan dengan lebih baik.

Dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung menyatakan hal-hal tersebut yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu tentu saja diterapkan karena dinilai berpengaruh pada rencana anggaran. Meskipun dalam penyusunan perencanaan anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, tapi masih saja belum optimal, ini terbukti dari adanya poin-poin tersebut masih ada yang belum diperhatikan. Salah satu poin tersebut adalah data-data di waktu yang lalu berupa data-data kinerja keuangan yaitu



laporan keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung tahun sebelumnya.

Pada poin tersebut masih belum sepenuhnya diperhatikan, akan berdampak pada saat melakukan evaluasi, rencana anggaran meningkat dari tahun sebelumnya tetapi tidak diikuti dengan beberapa capaian kinerja keuangan yang meningkat pula. Selain itu, terlihat dari adanya anggaran yang sisa dan persentase realisasi rencana anggaran yang belum tercapai semua. Keberadaan sisa anggaran dan belum tercapainya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja keuangannya juga dapat dikatakan belum optimal.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dengan data perencanaan anggaran serta laporan keuangan selama lima tahun terakhir yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017**

<b>Periode Anggaran</b>	<b>Uraian</b>	<b>Perencanaan Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2013	Belanja	3.556.435.069.635,98
	Belanja Tidak Langsung	2.354.334.863.212,12
	Belanja Langsung	1.202.10.206.422,72
2014	Belanja	4.340.959.468.801,78
	Belanja Tidak Langsung	3.962.976.204.443,78
	Belanja Langsung	1.705.996.131.498,00

1	2	3
2015	Belanja	5.142.388.330.904,74
	Belanja Tidak Langsung	2.848.667.814.356,15
	Belanja Langsung	2.293.720.516.546,12
2016	Belanja	5.090.337.098.276,41
	Belanja Tidak Langsung	2.979.852.323.636,13
	Belanja <sup>Langsung</sup>	2.110.484.774.639,10
2017	Belanja	5.206.140.599.760,41
	Belanja Tidak Langsung	2.678.156.996.982,12
	Belanja Langsung	2.569.496.962.512,03

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (diolah oleh peneliti)

**Tabel 1.2**  
**Laporan Keuangan pada Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten**  
**Bandung**  
**Tahun 2013-2017**

Periode	Uraian	Perencanaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Satuan Target	Persentasi Realisasi Anggaran
1	4	3	4	5	6	7
2013	Belanja	3.556.435.069.636,98	3.242.165.132.570,50	314.269.937.066,48	89%	91%
	Belanja Tidak Langsung	2.354.334.863.212,12	2.098.811.630.417,00	255.523.232.795,12		
	Belanja Langsung	1.202.100.206.422,00	1.143.353.502.153,50	58.746.704.269,50		
2014	Belanja	4.340.959.468.801,78	3.823.064.504.314,00	517.894.964.487,78	90%	88%
	Belanja Tidak Langsung	3.962.976.204.443,78	2.410.191.201.425,00	1.552.785.003.018,78		
	Belanja Langsung	1.705.996.131.498,00	1.412.873.302.889,00	293.122.828.609,00		
2015	Belanja	5.142.388.330.904,74	4.607.334.886.117,81	535.053.444.787,07	90%	89%
	Belanja Tidak Langsung	2.848.667.814.456,15	2.507.063.138.219,00	341.604.676.237,15		
	Belanja Langsung	2.293.720.516.546,00	2.037.271.747.898,81	256.448.768.648,81		

1	4	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2016	Belanja	5.090.337.098.276,41	4.640.192.716.482,49	450.144.381.794,08	89%	91%
	Belanja Tidak Langsung	2.979.852.323.636,13	2.719.805.948.121,00	260.046.375.515		
	Belanja Langsung	2.110.484.774.639,10	1.920.386.768.360,00	190.098.006.279,10		
2017	Belanja	5.206.140.599.760,41	4.609.698.467.829,26	596.442.131.931,15	89%	88%
	Belanja Tidak Langsung	2.678.156.996.982,12	2.368.189.930.538,00	309.967.066.444,12		
	Belanja Langsung	2.569.496.962.512,03	2.278.468.378.290,00	291.028.584.222		

Sumber: Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah (diolah oleh peneliti)

Pada tahun 2013 perencanaan anggaran belanja sebesar Rp.3.556.435.069.636,98 perencanaan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.354.334.863.212,12 perencanaan anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.202.100.206.422,00 dan belanja terealisasi sebesar Rp.3.242.165.132.570,50 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.2.098.811.630.417,00 belanja langsung terealisasi sebesar Rp.1.143.353.502.153,50 dalam persentase 91%.

Pada tahun 2014 mengalami kenaikan perencanaan anggaran belanja sebesar Rp.4.340.959.468.801,78 perencanaan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.3.962.976.204.443,78 perencanaan anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.705.996.131.498,00 dan belanja terealisasi sebesar Rp.3.823.064.504.314,00 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.2.410.191.201.425,00 belanja langsung terealisasi sebesar Rp.1.412.873.302.889,00 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.1.412.873.302.889,00 dalam persentase 88% mengalami penurunan sekitar 3% dari tahun 2013.

Pada tahun 2015 mengalami kenaikan perencanaan anggaran belanja sebesar Rp.5.142.388.330.904,74 perencanaan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.848.667.814.156,15 perencanaan belanja langsung sebesar Rp.2.293.720.516.546,00 dan belanja terealisasi sebesar Rp.4.607.334.886.117,81 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.2.507.063.138.219,00 belanja

langsung terealisasi sebesar Rp.2.037.271.747.898,81 dalam persentasenya 89% mengalami kenaikan 1% dari tahun 2014.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan perencanaan anggaran belanja sebesar Rp.5.090.337.098.276,41 perencanaan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.979.852.323.636,13 perencanaan anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.110.484.774.639,10 dan belanja terealisasi sebesar Rp.4.640.192.716.482,49 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.2.719.805.948.121,00 belanja langsung terealisasi sebesar Rp.1.920.386.768.36,00 dalam persentase 91% mengalami kenaikan 2% dari tahun 2016.

Pada tahun 2017 mengalami kenaikan perencanaan anggaran belanja sebesar Rp.5.206.140.599.760,41 perencanaan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.678.156.996.982,12 perencanaan anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.569.496.962.512,03 dan belanja terealisasi sebesar Rp.4.609.698.467.829,26 belanja tidak langsung sebesar Rp.2.368.189.930.538,00 belanja langsung sebesar Rp.2.278.468.378.290,00 dalam persentase 88% mengalami penurunan 3% dari tahun 2016.

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa setiap tahunnya perencanaan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan . Dan melihat pada tabel 1.2 realisasi anggaran dari tahun 2013 hingga 2017 persentasenya naik turun dan otomatis sisa anggaranya pun naik turun juga.Apabila hal ini dikaitkan dengan ungkapan Kasubag Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran pada Badan keuangan Daerah Kabupaten Bandung belum optimal dan belum stabil pada kinerja keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

Setelah mengamati laporan keuangan diatas hal ini bisa terjadi adanya :

1. Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal.
2. Perencanaan yang kurang matang, terlihat ada beberapa yang tidak mencapai target.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan penulis diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul yaitu **“Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum diperhatikannya hal-hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu data-data di waktu yang lalu berupa data-data kinerja keuangan yaitu laporan keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung tahun sebelumnya. Pada poin ini lah akan berdampak saat melakukan evaluasi, rencana anggaran meningkat dari tahun sebelumnya tetapi tidak diikuti dengan beberapa capaian kinerja keuangan yang meningkat pula.
2. Masih belum tercapainya realisasi rencana anggaran di tahun 2014, 2015 dan 2017 dimana satuan target pada tahun 2014 sebesar 90% baru terealisasi 88%, kemudian pada tahun 2015 satuan target sebesar 90% baru terealisasi 89% dan pada tahun 2017 satuan target 89% baru terealisasi 88%. Serta masih adanya

sisanya anggaran yang menyebabkan kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung belum optimal.

3. Peningkatan yang belum stabil dalam perencanaan anggaran dapat dilihat pada tahun 2015 perencanaan anggaran sebesar Rp 5.142.388.330.904,74 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp 5.090.337.098.276,41 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.206.140.599.760,41 begitu juga pada realisasi anggaran dan persentase realisasi anggaran pada setiap tahunnya yang menyebabkan kinerja keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung belum stabil.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang peneliti kemukakan adalah

1. Seberapa besar pengaruh signifikansi perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
2. Seberapa besar pengaruh fleksibilitas perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
3. Seberapa besar pengaruh relevansi perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?

4. Seberapa besar pengaruh kepastian perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
5. Seberapa besar pengaruh ketelitian perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
6. Seberapa besar pengaruh adaptabilitas perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
7. Seberapa besar pengaruh waktu perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
8. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu

1. Dapat mengetahui berapa besar signifikansi perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

2. Dapat mengetahui berapa besar fleksibilitas perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
3. Dapat mengetahui berapa besar relevansi perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
4. Dapat mengetahui berapa besar kepastian perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
5. Dapat mengetahui berapa besar ketelitian perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
6. Dapat mengetahui berapa besar adaptabilitas perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
7. Dapat mengetahui berapa besar waktu perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
8. Dapat mengetahui berapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.



## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

#### **a. Bagi Peneliti**

1. Untuk penguatan pengembangan Ilmu Administrasi Publik konsentrasi administrasi keuangan.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang perencanaan anggaran dan laporan keuangan.

#### **b. Bagi Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan tentang perencanaan anggaran dan laporan keuangan serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan berkontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan kita dalam wawasan keilmuan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan laporan keuangan yang dimana kedua teori tersebut berdasarkan referensi yang relevan.

#### **c. Bagi Umum**

1. Menambah referensi keilmuan bagi perkembangan teori-teori dibidang Administrasi Keuangan Negara.

2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain khususnya mahasiswa administrasi publik yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian sejenis.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi peneliti**

1. Untuk melatih dan membangun pola pikir ilmiah serta menginterpretasikannya kedalam suatu karya ilmiah tertulis dan mencoba menerapkan serta membandingkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan realita yang ada, sehingga dapat menambah wawasan dan cara berpikir penulis. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai pengaruh perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan dengan melakukan penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

### **b. Bagi Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung**

1. Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tentang pengaruh

perencanaan anggaran terhadap laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

**c. Bagi Umum**

1. Menambah kumpulan riset-riset yang berasal dari mahasiswa untuk selanjutnya digunakan sebagaimana dibutuhkan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang membutuhkan.

**F. Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Operasional teori dalam penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik yang disebut Akuntansi Pemerintahan merujuk pada teori Bastian (2005:15) Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai: “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”.

Menurut Fattah (2006:47) perencanaan anggaran adalah suatu rencana opsi dari suatu kegiatan yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk satu periode tertentu agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang

tercapainya tujuan. Perencanaan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode yang akan datang hal ini tertuang dalam laporan keuangan.

Menurut Majid (2009:18), perencanaan memiliki dimensi sebagai berikut :

1. Signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada tujuan yang diajukandan signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun selama proses perencanaan.
2. Fleksibilitas. Perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realitas baik yang berkaitan dengan biaya maupun implementasinya.
3. Relevansi. Relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan secara optimal.
4. Kepastian. Kepastian minimum diharapkan agar dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga.
5. Ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan disusun dalam bentuk yang sederhana serta perlu diperhatikan secara sensitive kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen.
6. Adaptabilitas. Bahwa perencanaan bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau *adaptable* dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.
7. Waktu. Factor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan juga dan reabilitas analisa yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan dengan masa yang mendatang.

Menurut Munawir (2012:22) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan juga merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah dalah unit pemerintahan yang

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Adapun karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Suwanda (2015:68) keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

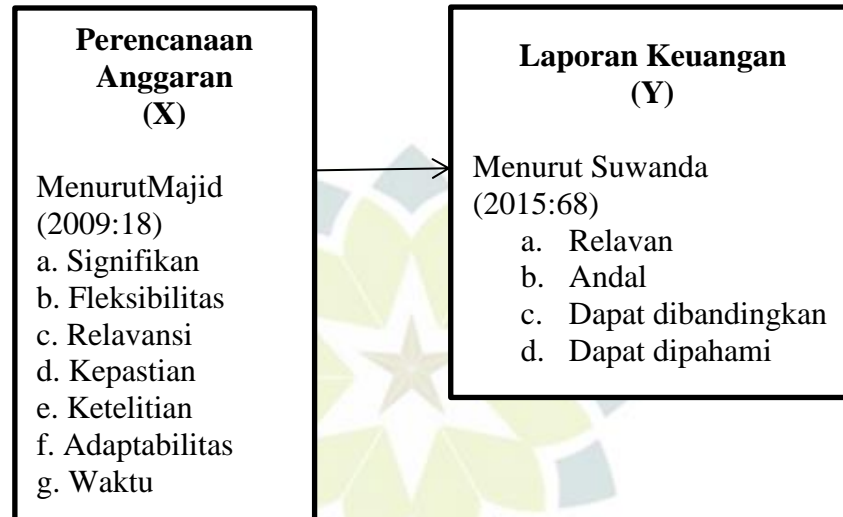
1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandingkan.
4. Dapat dipahami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel X Perencanaan Anggaran dengan variabel Y Laporan Keuangan.

Kerangka pemikiran penelitian diatas dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1

## Kerangka Pemikiran

**G. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis  $X_1$ 

$H_0$  : Perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan

$H_a$  : Perencanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan